

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

Oleh:

Amanda Fitria Khoirun Nadzifah¹

Rafih²

Loli Santan Laysia³

Syafi' Badi'atul Fudlah⁴

Amalia Nuril Hidayati⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: JL. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: amandaafitria05@gmail.com , rafihpusat@gmail.com ,
lolilaysia@gmail.com , syfffdlh08@gmail.com , amalianoeril@gmail.com

Abstract. This study aims to review the function of money in Islamic economics in the context of the challenges of the climate crisis and analyze the role of green Islamic monetary policy in realizing sustainable finance. The climate crisis has prompted the need for a transformation of the economic paradigm to align with the values of justice, welfare, and environmental preservation. The research method used was qualitative with a library research approach through analysis of literature such as journals, books, and scientific articles. The results show that, from an Islamic perspective, money is not a commodity worthy of being traded solely for profit, but rather a medium of exchange that has a social function and must be managed productively and ethically. Therefore, the role of money needs to be directed towards financing the green sector and environmentally friendly economic activities in accordance with the principles of *maqasid al-Shari'ah*. In this way, money functions as a moral instrument that can create economic balance while maintaining ecological sustainability. Although challenges remain, such as the lack of global standards, low green finance literacy, and limited funding for green projects,

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS

TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

strengthening regulations, innovation in financial instruments, and cross-institutional collaboration are believed to be able to strengthen its implementation

Keywords: *Money Function, Islamic Economy, Climate Crisis, Green Islamic Monetary Policy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali fungsi uang dalam ekonomi Islam dalam konteks tantangan krisis iklim, serta menganalisis peran kebijakan moneter Islam hijau (*green Islamic monetary policy*) dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan. Krisis iklim mendorong perlunya transformasi paradigma ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, uang bukan komoditas yang layak diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan alat tukar yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola secara produktif serta etis. Oleh karena itu, peran uang perlu diarahkan pada pembiayaan sektor hijau dan kegiatan ekonomi ramah lingkungan sesuai prinsip maqashid al-syari‘ah. Dengan demikian, fungsi uang menjadi instrumen moral yang dapat menciptakan keseimbangan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi. Walaupun masih terdapat tantangan seperti minimnya standar global, rendahnya literasi *green finance*, serta keterbatasan proyek hijau yang layak dibiayai, penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan, dan kolaborasi lintas lembaga diyakini mampu memperkuat implementasinya.

Kata Kunci: Fungsi Uang, Ekonomi Islam, Krisis Iklim, Kebijakan Moneter Islam Hijau.

LATAR BELAKANG

Perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi masalah serius terkait keberlangsungan dan efek perubahan iklim. Di tengah meningkatnya kesadaran akan kebutuhan menjaga lingkungan, gagasan mengenai keuangan berkelanjutan menjadi semakin relevan. Keuangan berkelanjutan merujuk pada investasi serta kebijakan yang mendukung proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi lingkungan, seperti

energi yang dapat diperbarui dan pelestarian sumber daya alam. Dalam konteks ekonomi syariah, investasi yang berkelanjutan tidak hanya menitik beratkan pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan keseimbangan dengan alam.

Krisis iklim dan ketidakpastian ekonomi dunia telah muncul sebagai masalah yang kompleks, memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Fluktuasi nilai tukar, masalah energi, dan semakin seringnya bencana alam memerlukan metode pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Dalam situasi krisis iklim, menjaga kehidupan dan aset menjadi sangat penting karena bencana alam dapat membahayakan keselamatan manusia dan keberlangsungan ekonomi. Dengan demikian, *green financing* yang berlandaskan syariah adalah wujud nyata dari maqashid syariah di zaman sekarang. Integrasi ini juga menunjukkan pembaruan. *Green funding* dalam konteks ekonomi Islam menawarkan kelebihan strategis dalam menangani perubahan ekonomi global. Krisis yang muncul karena pandemi, inflasi, dan ketegangan geopolitik telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pembiayaan yang kuat dan menyeluruh.

Ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh peran uang dan sistem moneter yang berjalan. Uang berfungsi seperti darah dalam tubuh tanpa uang yang stabil, ekonomi negara bisa mengalami kemunduran atau krisis. Oleh karena itu, eksistensi uang sangat penting. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dan suku bunga, dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, kebijakan ini harus mengikuti prinsip agama untuk mencapai stabilitas harga, keseimbangan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang adil.

Namun, pandangan tentang kebijakan moneter berbeda antara sistem ekonomi Konvensional dan Islam. Sistem moneter dalam Islam bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan, menekankan makna penting keadilan dalam kehidupan manusia serta pelayanan kepada kelompok tertentu. Tujuan kebijakan moneter meliputi menjaga nilai tukar yang stabil, kelancaran sistem pembayaran, kesehatan sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Banyak krisis ekonomi dimulai dari masalah di sektor valuta, dan kurangnya informasi sering merugikan pasar keuangan. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi nasional.

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS

TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

KAJIAN TEORITIS

Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang tidak diposisikan sebagai komoditas yang memiliki nilai pada dirinya sendiri, melainkan sebagai alat tukar yang berfungsi untuk memudahkan proses transaksi ekonomi. Nilai uang terletak pada fungsinya sebagai perantara dalam pertukaran barang dan jasa serta sebagai ukuran nilai. Islam menolak pengguna uang memperoleh keuntungan melalui riba, spekulasi, atau penimbunan karena bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

Sementara fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan standar pembayaran di masa depan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli ekonomi Islam. Sebagian menganggap kedua fungsi tersebut dapat diterima selama uang tetap berperan dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan tidak menghambat perputaran harta di masyarakat. Islam menekankan bahwa uang harus terus bergerak dalam aktivitas yang halal, seperti perdagangan dan investasi riil, agar menciptakan kemaslahatan, mengurangi kesenjangan, dan menjaga kestabilan ekonomi.

Prinsip Etika Lingkungan dalam Islam

Dalam etika lingkungan islam terdapat tiga prinsip yaitu:

1. Prinsip Khalifah yaitu menegaskan peran manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola dan menjaga alam. Sebagai khalifah, manusia wajib memelihara keseimbangan ekosistem serta menggunakan sumber daya alam secara bijak, tidak merusak lingkungan dan menjaga alam merupakan tanggung jawab moral serta bentuk ibadah kepada Allah SWT(Fajriansyah dkk., 2021:15-30).
2. Prinsip Mizan berarti keseimbangan yang harus dijaga agar kehidupan tetap harmonis. Prinsip ini menegaskan agar manusia berlaku adil dan tidak merusak tatanan alam. Menjaga mizan berarti melestarikan ciptaan Allah dan mencegah kerusakan akibat keserakahan manusia.
3. Prinsip Amanah mengandung makna bahwa bumi adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan penuh tanggung jawab. Manusia tidak memiliki alam secara mutlak, tetapi berkewajiban melestarikannya bagi generasi mendatang. Menjaga lingkungan menjadi bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah.

***Green Finance* dalam Sistem Keuangan Islam**

Mirip dengan *green finance*, keuangan syariah memiliki tujuan untuk mendukung dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui konsep keadilan, kesetaraan, dan moralitas. Kesamaan ini berasal dari prinsip-prinsip utama maqasid al syariah yang menjelaskan kebutuhan untuk melindungi maal atau harta dan nasl atau keturunan, sebagai contoh seperti yang diinstruksikan dalam ajaran Islam, manusia, sebagai perwakilan Tuhan di dunia, memiliki tanggung jawab untuk berjuang demi kesejahteraan tertinggi seluruh makhluk, individu, dan generasi dari ciptaan Tuhan.

Kemampuan keuangan syariah untuk menarik sumber dana baru yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh *green finance* kini mulai terlihat sebagai nilai penting. Hal ini memperkuat argumen untuk memanfaatkan keuangan syariah dalam mengintegrasikan elemen-elemen ramah lingkungan dalam pendanaannya.(Zulpahmi dkk, 2022:66-67)

***Green Monetary Policyan* Peran Bank**

Suku bunga memegang peran krusial dalam menentukan biaya modal bagi investor dan memengaruhi keputusan investasi yang mereka ambil. Ketika suku bunga berada pada level rendah, hal tersebut dapat mendorong peningkatan green investment karena biaya modal menjadi lebih murah dan nilai kini dari arus kas masa depan proyek berkelanjutan meningkat. Selain itu, suku bunga turut mempengaruhi permintaan agregat dan output perekonomian, yang pada akhirnya berdampak tidak langsung terhadap kebutuhan akan produk dan jasa ramah lingkungan.

Dalam jangka pendek, suku bunga rendah dapat memperkuat green investment melalui peningkatan permintaan agregat, produksi, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara dalam jangka panjang, kebijakan suku bunga rendah mampu mendorong green investment dengan menurunkan biaya modal, meningkatkan nilai kini arus kas proyek hijau, serta memperkuat daya saing produk berkelanjutan di pasar domestik maupun internasional. Bank sentral juga dapat menggunakan berbagai instrumen analisis dampak lingkungan dan *green monetary policyan* untuk menilai pengaruh kebijakan moneter terhadap investasi ramah lingkungan, sekaligus menciptakan iklim yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

Tantangan utama dalam merancang kebijakan moneter yang mempertimbangkan green investment adalah menemukan titik keseimbangan antara upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan moneter dapat memengaruhi green investment tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. (Abdillah & Hendri, 2023:70)

Integritas Nilai Lingkungan dalam Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter adalah instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara melalui pengendalian jumlah uang beredar, penetapan suku bunga, dan pengawasan kegiatan perbankan. Dalam pandangan Islam, kebijakan moneter tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, tetapi juga wajib sejalan dengan prinsip moral, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.

Bank sentral dalam sistem keuangan syariah menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan adil. Kebijakan moneter ekspansif dapat mendukung pembiayaan pada sektor ramah lingkungan, sedangkan kebijakan kontraktif membantu mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Integritas nilai lingkungan dalam kebijakan moneter Islam menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian alam. Prinsip maslahah menjadi dasar bahwa kebijakan moneter tidak hanya mengejar stabilitas harga, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi kemaslahatan umat. (Fika & Naim, 2025:64)

Tantangan Teoretis dan Praktis *Green Islamic Monetary Policy*

Meskipun potensi besar untuk mengintegrasikan *green finance* dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, antara lain:

1. Kurangnya Standar Internasional: Belum adanya standar global yang seragam mengenai definisi, kriteria, serta mekanisme penerapan *green finance* berbasis syariah menimbulkan kebingungan bagi investor sehingga menghambat perkembangan pasar keuangan hijau syariah secara global.

2. Keterbatasan Pengetahuan: Rendahnya literasi dan pemahaman kalangan investor, regulator, dan lembaga keuangan syariah terhadap konsep *green finance* menyebabkan integrasi prinsip keberlanjutan dengan nilai-nilai syariah belum maksimal.
3. Regulasi yang Berbeda: Perbedaan regulasi antara *green finance* dan sistem keuangan syariah di berbagai negara menimbulkan ketidakharmonisan kebijakan, ketidakpastian, dan memperlambat penerapan instrumen keuangan hijau berbasis syariah secara efektif. (Arinal, 2025:4-5)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik fungsi uang dalam ekonomi Islam serta *green islamic monetary policy*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teoritis dan konseptual, bukan pada pengumpulan data lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis secara mendalam konsep-konsep ekonomi Islam yang berkaitan dengan fungsi uang dan relevansinya dalam menghadapi krisis iklim.

Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data pustaka, klasifikasi berdasarkan tema utama, analisis isi (*content analysis*) terhadap pandangan para ahli, dan penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif. Melalui metode ini, penelitian berupaya menemukan hubungan antara prinsip ekonomi Islam, *green monetary policy*, dan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman tentang bagaimana fungsi uang dalam ekonomi Islam dapat diarahkan untuk mendukung *green economic* yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-syari‘ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Uang Dalam *Green Economy* Ditinjau Ulang Menghadapi Krisis Iklim

Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi uang pada dasarnya dibatasi hanya pada dua aspek utama, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Uang tidak boleh berfungsi sebagai komoditas yang diperjual belikan karena

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

hal tersebut dapat memunculkan praktik riba dan spekulasi yang dilarang oleh syariah. Pembatasan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan uang sebagai sarana transaksi riil yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, bukan sebagai alat akumulasi kekayaan. Dalam konteks krisis iklim, prinsip ini menjadi relevan karena sistem ekonomi Islam menolak eksplorasi sumber daya dan penimbunan kapital yang berkontribusi terhadap ketimpangan dan kerusakan lingkungan. (Faisal, 2020:87-90)

Rekonseptualisasi fungsi uang menghadapi krisis iklim menuntut agar uang kembali menjadi alat sirkulasi nilai, bukan alat akumulasi. Dalam ekonomi Islam, setiap peredaran uang harus membawa manfaat sosial dan ekologis yang nyata. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang menggunakan uang seharusnya diarahkan pada investasi yang berorientasi pada kelestarian alam, seperti pembiayaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah berbasis syariah. Penggunaan uang sebagai *medium of exchange* yang halal juga mengandung nilai moral bahwa transaksi harus memberi maslahat bagi manusia dan lingkungan, bukan memperparah degradasi ekosistem. (Muhammad, 2024: 152-153).

Selain itu, Islam memandang bahwa stabilitas nilai uang berkaitan erat dengan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis. Ketika uang digunakan secara spekulatif atau disimpan tanpa tujuan produktif, sirkulasi ekonomi terganggu, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan dan menekan kelompok rentan terhadap dampak krisis iklim. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu mengintegrasikan prinsip maqashid al-syari‘ah dalam menjaga nilai uang agar berfungsi mendukung keberlanjutan. Upaya seperti zakat, larangan riba, dan instrumen qard hasan berperan penting untuk menyalurkan uang kepada sektor produktif yang ramah lingkungan dan berkeadilan. (Muhammad, 2024:154)

Dengan demikian, fungsi uang dalam ekonomi Islam jika ditinjau ulang adalah menghadapi krisis iklim bukan hanya persoalan moneter, melainkan bagian dari etika lingkungan. Uang menjadi instrumen moral untuk mencapai kesejahteraan bersama (maslahah ‘ammah) dan menghindari kerusakan di bumi (fasad fi al-ardh). Prinsip ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan fiskal atau moneter semata, tetapi melalui transformasi nilai dalam penggunaan uang

sesuai syariah yakni menjadikannya alat untuk keseimbangan sosial, spiritual, dan ekologis yang saling terikat.

Green Islamic Monetary Policy Menginternalisasi Nilai Lingkungan

Green islamic monetary policy adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi dengan menggunakan instrumen keuangan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, guna mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Nanang, 2019: 178). Instrumen keuangan Islam untuk *green economy* antara lain *green sukuk*, wakaf produktif, dan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Green sukuk adalah salah satu instrumen keuangan berdasarkan syariah yang dibuat khusus untuk mendanai proyek yang ramah lingkungan. Beberapa proyek yang sudah didanai melalui *green sukuk* antara lain pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, pengelolaan air dan limbah secara bertanggung jawab, serta restorasi hutan dan konservasi lingkungan.

Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Aset wakaf yang dikelola dengan baik bisa digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur hijau, mendorong pengembangan usaha yang ramah lingkungan, serta memberikan akses masyarakat terhadap fasilitas yang berkelanjutan seperti rumah sakit yang menggunakan energi terbarukan.

Selain itu, prinsip syariah melarang aktivitas ekonomi yang merugikan lingkungan seperti gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi). Hal ini mendorong penerapan manajemen yang baik dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan Islam. (Huril dkk, 2024: 522)

Tantangan Teoritis dan Praktis Penerapan *Green Islamic Monetary Policy*

Green islamic monetary policy merupakan pendekatan baru dalam sistem ekonomi Islam yang berupaya menggabungkan stabilitas keuangan dengan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa kebijakan moneter tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini menggunakan

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan eksploitasi sumber daya berlebihan sebagai landasan moral dan operasional dalam mengarahkan aliran dana ke sektor ekonomi yang ramah lingkungan (Eva dkk, 2025: 141).

1. Tantangan Teoritis

Dari sisi teori, persoalan utama *green islamic monetary policy* terletak pada sinkronisasi antara prinsip-prinsip syariah dan mekanisme moneter modern. Sistem keuangan global masih menggunakan suku bunga sebagai alat utama pengendalian moneter, sementara Islam melarang penerapan bunga karena dinilai tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, masih dibutuhkan model moneter syariah yang mampu menggantikan fungsi suku bunga dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter syariah dan keberlanjutan lingkungan menjadi kendala tersendiri. Selama ini, fokus utama penelitian ekonomi Islam masih berkisar pada aspek pemerataan sosial dan keadilan ekonomi, sedangkan integrasi dimensi ekologis baru mulai dibahas dalam beberapa tahun terakhir. (Eva dkk, 2025: 142-144).

Dari sudut pandang maqashid syariah, masih terdapat perdebatan mengenai posisi lingkungan dalam kerangka tujuan syariah. Sebagian ulama berpandangan bahwa prinsip Islam secara inheren telah mendukung pelestarian alam melalui konsep maslahah dan mizan (keseimbangan), tetapi prinsip tersebut belum memiliki indikator operasional yang konkret (Rasidah dkk, 2025: 48). Akibatnya, dalam tataran teoretis, *green islamic monetary policy*, sering kali sulit diukur efektivitasnya secara kuantitatif.

2. Tantangan Praktis

Dalam praktiknya, *green islamic monetary policy* menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakharmonisan regulasi dan green standard berbasis syariah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan *Green Taxonomy* Indonesia, integrasinya dengan kerangka hukum syariah belum optimal, sehingga membuka peluang terjadinya greenwashing atau penyalahgunaan label “green” tanpa verifikasi substansial. (Rasidah dkk, 2025: 51).

Tantangan berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi *green ecofi* kalangan masyarakat dan pelaku industri keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan Islam

belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai mekanisme green financing seperti *green sukuk* atau pembiayaan proyek energi terbarukan. Selain itu, minimnya *green project* yang layak secara ekonomi (*bankable*) menjadi kendala dalam implementasi *green Islamic monetary policy*. Proyek lingkungan sering dianggap memiliki risiko tinggi dan tingkat pengembalian rendah, sementara dukungan fiskal seperti subsidi dan insentif pajak dari pemerintah masih terbatas. (Rasidah dkk, 2025: 52).

3. Strategi Penguatan dan Solusi

Pertama, pengembangan teori *green islamic monetary* perlu diarahkan pada integrasi maqashid syariah dengan indikator *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan moneter yang pro lingkungan. (Eva dkk, 2025:144). Kedua, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi antarotoritas seperti Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan keselarasan antara prinsip green finance dan prinsip syariah. Ketiga, peningkatan literasi *green finance* harus menjadi agenda prioritas, baik melalui pendidikan formal, riset akademik, maupun pelatihan industri keuangan, agar masyarakat dan pelaku bisnis lebih memahami manfaat ekonomi sekaligus spiritual dari green instruments berbasis syariah. Keempat, dibutuhkan inovasi instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk* wakaf eco mudharabah, dan dana zakat produktif untuk mendukung pendanaan proyek energi terbarukan dan kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Terakhir penguatan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi internasional dengan lembaga seperti *Islamic Development Bank (IsDB)*, World Bank, dan *UNEP Finance Initiative* dapat memperluas akses pendanaan hijau serta mempercepat transisi menuju ekonomi Islam yang berkelanjutan. (Rasidah dkk, 2025:55)

Peran Uang Dalam Moneter Islam Menuju *Green Economy* Berkelanjutan

Ekonomi tradisional menyatakan bahwa uang dan barang memiliki fungsi yang serupa, sehingga tercipta berbagai pasar di mana uang diperlakukan sebagai komoditas dan bunga berfungsi sebagai harga. Pasar moneter ini berkembang seiring dengan pasar riil (barang dan jasa), mencakup pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Oleh karena itu, pasar ini dibagi ke dalam dua sektor dalam ekonomi tradisional yaitu moneter dan rill. Sistem moneter Islam berbeda dengan sistem moneter konvensional, keduanya memiliki perbedaan dalam instrumen yang digunakan.

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP *GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY*

Kebijakan moneter Islam dan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perekonomian. Islam menerapkan prinsip bagi hasil yang berfokus pada pembagian laba dan kerugian, Sedangkan konvensional mengandalkan suku bunga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter Islam adalah memastikan aliran sumber daya ekonomi tetap berjalan, dengan menekankan pergerakan uang sebagai barang publik yang harus beredar dan tidak boleh disimpan. Dalam ekonomi Islam, penyimpanan uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sehingga uang harus senantiasa beredar untuk mempertahankan sirkulasi sumber daya finansial.

Sistem moneter mengatur jumlah uang yang beredar melalui dua jenis kebijakan yaitu ekspansif yang bertujuan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan kontraksioner yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar dan dikenal sebagai kebijakan uang ketat. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam dan konvensional memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur perekonomian. (Evi dkk, 2025: 154-155).

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting yang meliputi penetapan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengaturan likuiditas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Penelitian Milla Naeruz (2021) menegaskan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan bank sentral seperti Bank Indonesia berfungsi menjaga stabilitas nilai tukar melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penyesuaian suku bunga guna memastikan kestabilan perekonomian. Dalam ekonomi syariah, kebijakan moneter harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang menolak praktik riba dan mengedepankan sistem bagi hasil yang lebih adil. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan makroekonomi sebagai dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya mengendalikan inflasi dan mempertahankan stabilitas harga menjadi prioritas utama agar para pelaku ekonomi dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih pasti. Stabilitas harga juga merupakan elemen penting dalam menjaga nilai-nilai etis Islam, khususnya terkait keadilan dalam aktivitas ekonomi. (Fika & Niam, 2025:70)

Selain itu, kebijakan moneter turut memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Misalnya, kenaikan suku bunga dalam sistem konvensional bisa menyulitkan akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil, sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, perancangan kebijakan moneter perlu

memperhatikan prinsip keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan dalam konsep halal dan haram. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya menekankan pengendalian inflasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Loso, 2025:55-56)

KESIMPULAN DAN SARAN

Krisis iklim menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan dan profit, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dan satuan nilai yang harus digunakan secara produktif, tidak boleh menjadi komoditas yang menguntungkan pihak tertentu melalui praktik riba dan spekulasi. Pemahaman ini menempatkan uang sebagai instrumen moral yang mendorong aktivitas ekonomi yang memberi maslahat bagi masyarakat dan lingkungan.

Green Islamic Monetary Policy kemudian menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan moneter mendukung pendanaan sektor hijau, seperti energi terbarukan, konservasi alam, dan pembangunan berkelanjutan lainnya. Melalui instrumen syariah seperti *green sukuk*, wakaf produktif, serta mekanisme bagi hasil, sistem keuangan Islam dapat berkontribusi nyata pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syari‘ah yang menekankan perlindungan harta, kehidupan, dan kelestarian bumi.

Walaupun masih terdapat tantangan seperti minimnya standar global, rendahnya literasi *green finance*, serta keterbatasan proyek hijau yang layak dibiayai, penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan, dan kolaborasi lintas lembaga diyakini mampu memperkuat implementasinya. Dengan demikian, fungsi uang dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong transisi menuju *green economy* yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, F. (2020). Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. EKSYA: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82-91. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksyia/article/view/505>

FUNGSI UANG DALAM KRISIS IKLIM: ANALISIS KRITIS TERHADAP GREEN ISLAMIC MONETARY POLICY

- Amirullah, S. H. A. (2025). Model kebijakan moneter Islam dalam menghadapi krisis ekonomi. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 244. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.394>
- Aulina, E. S., Lilis, L., Nisa, R. A., & Sari, R. N. (2025). Peran uang dalam sistem moneter Islam: Membangun ekonomi yang adil dan stabil. Moneter: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 139-157. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1106>
- Fajriansyah, I., Hasanah, U., & Murtadho, A. (2021). Eksistensi pendidikan lingkungan hidup dalam ranah pendidikan Islam. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 15–30. <https://doi.org/10.33511/qiroah.v21n1.15-30>
- Hakim, M. H. (2024). Peran uang dan harga dalam ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 2(2), 148-154. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i2.4244>
- Huril A'ini, et al. (2024). Keuangan Islam sebagai katalisator green economy: Menuju pencapaian SDGs dalam kerangka maqashid syariah. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 522.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan: Analisis literatur teoritis dan empiris. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 52–60.
- Prasetyo, A. D., & Adinugraha, H. H. (2023). Kebijakan moneter dan keuangan berkelanjutan: Pengaruh terhadap investasi hijau. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(2), 70. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/aliqtishad>
- Rahmati, A. (2025). Investasi berkelanjutan dan keuangan hijau dalam ekonomi syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 4–5. <https://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Rasidah, F., & Naim. (2025). Analisis peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan: Tinjauan dari perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, 1(1), 63–74. <https://jurnal.yapakama.com/index.php/JAMED>
- Sobarna, N. (2019). Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial*, 1(2), 178.

- Zaenab, Z., Safitri, R. A., & Faqih, A. (2024). Analisis peran kebijakan moneter dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam tinjauan ekonomi syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 2–10. PT. Media Akademik Publisher. <https://doi.org/10.62281>
- Zulpahmi, et al. (2022). *Islamic green finance: The future of finance*. Yogyakarta: Grandia Publisher.